

ANALISIS KESIAPAN UPT PUSKESMAS LOTU MENGHADAPI AKREDITASI PUSKESMAS

**Iradat Zega¹, Kintoko Rochadi², Frida Lina Tarigan³, Donal Nababan⁴,
Mido Ester J. Sitorus⁵, Sonny Priajaya Warouw⁶**

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pascasarjana Universitas Sari Mutiara Indonesia
iradatz@yahoo.com¹, Kintoko@gmail.com²

ABSTRACT

The Community Health Center is a functional organization that organizes health efforts that are comprehensive, integrated, equitable, acceptable and affordable to the community. To ensure the quality of health services, puskesmas are required to be accredited. In North Nias Regency, one of the UPT Puskesmas must be accredited to improve the quality of services in the community. To carry out this accreditation, puskesmas are required to make preparations before accreditation. The research carried out is a qualitative research with the aim of providing a comprehensive, broad and in-depth picture of the readiness of the Lotu Health Center UPT to Face Lotu Health Center Accreditation. The data were collected by means of in-depth interviews and also by making observations. Furthermore, the data will be analyzed by researchers to make it easier to see the complete data. The results showed that the UPT Puskesmas Lotu was still not ready for accreditation. This is due to the incomplete requirements provided for accreditation such as the unpreparedness of puskesmas accreditation documents due to the Covid-19 pandemic, inadequate infrastructure such as laboratory equipment, dental examination kits. And seen from the human resources owned by the UPT Puskesmas Lotu, there are still a lot of shortcomings such as pharmacy staff, laboratory personnel, physiotherapy, and even general practitioners. Based on the results of the research, it is hoped that the UPT Puskesmas Lotu will immediately prepare for existing deficiencies such as completing accreditation documents, lacking facilities and infrastructure, preparing human resources, and increasing team cooperation so that preparations can be made more optimal. Coordination between the UPT Puskesmas Lotu and the North Nias Regency Health Office should be improved, especially in disbursing the accreditation budget.

Keywords : Readiness, Community Health Center Accreditation, Facing

ABSTRAK

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk menjamin kualitas mutu dari pelayanan kesehatan, maka puskesmas diwajibkan untuk diakreditasi.. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, luas dan mendalam tentang kesiapan UPT Puskesmas Lotu Menghadapi Akreditasi. Penelitian dilakukan pada bulan Juli – Agustus tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan juga dengan melakukan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT Puskesmas Lotu masih belum siap untuk diakreditasi. Hal ini disebabkan karena masih belum lengkapnya persyaratan-persyaratan yang disediakan untuk menghadapi akreditasi seperti belum siapnya dokumen akreditasi puskesmas karena Pandemi Covid – 19, sarana prasana yang belum memadai seperti peralatan laboratorium, alat pemeriksaan gigi. Dan dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki UPT Puskesmas masih banyak kekurangan seperti tenaga farmasi, tenaga laboratorium, fisioterapi, bahkan dokter umum. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada UPT Puskesmas untuk segera menyiapkan kekurangan-kekurangan yang ada seperti melengkapi dokumen akreditasi, sarana dan prasarana yang masih kurang, melakukan penyiapan sumber daya manusia, serta meningkatkan kerjasama tim agar persiapan yang dilakukan dapat lebih optimal. Koordinasi antara UPT Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara supaya ditingkatkan terutama dalam mencairkan anggaran akreditasi.

Kata Kunci : Kesiapan, Akreditasi Puskesmas, Menghadapi

PENDAHULUAN

Akreditasi Puskesmas tingkat dasar lebih mengutamakan pemenuhan standar dokumen Puskesmas. Untuk tercapainya pelaksanaan akreditasi Puskesmas harus didukung oleh berbagai pihak yang meliputi Kecamatan, PKK, Kader serta peran dari kepala Puskesmas dan pendamping akreditasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat George Edward III bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Semua faktor itu bekerja dan mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan, baik secara langsung, tidak langsung dan berinteraksi secara simultan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. (standar Akreditasi Puskesmas, 2018).

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi (Permenkes No.46 Tahun 2015). Dalam proses pengakreditasi Puskesmas perlu standar untuk melakukannya. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dimana terdapat 3 standard dengan 772 elemen penilaian akreditasi.

Dalam penilaian akreditasi Puskesmas terdapat tiga kelompok pelayanan yang dinilai yaitu berupa kelompok administrasi manajemen, kelompok upaya kesehatan masyarakat (UKM), dan juga kelompok upaya kesehatan perorangan. Ketiga kelompok tersebut merupakan poin utama

dalam penilaian akreditasi Puskesmas dimana setiap kelompok tersebut memiliki standar dan elemen penilaian yang telah ditetapkan.

Pengakreditasi Puskesmas di Indonesia sendiri dimulai sejak tahun 2015 dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2019. Puskesmas yang tidak terakreditasi pada tahun 2019 akan diberhentikan dari kerjasama dengan BPJS sebagai sanksinya. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2009-2014 jumlah Puskesmas yang terdapat di Indonesia yaitu sebanyak 9.731 unit. Sebanyak 600 Puskesmas telah mendaftar untuk dilakukannya akreditasi, sementara hingga November 2015, baru sebanyak 10 Puskesmas saja yang telah terakreditasi.

Berdasarkan penelitian Idris (2015) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor kendala dalam melakukan kesiapan Puskesmas dalam implementasi Akreditasi di Kota Lhoksumawe berupa; sumber daya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas dan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas belum memadai dan memenuhi standard, anggaran yang tersedia masih terbatas, serta belum adanya kebijakan terkait akreditasi Puskesmas daerah untuk melakukan persiapan dan penganggaran. Berhasilnya suatu akreditasi tidak lepas dari sumber daya tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas tersebut dan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas yang memadai dan memenuhi standard, anggaran yang tersedia, serta penganggaran

Penyelenggaraan akreditasi Puskesmas dilakukan secara bertahap kepada 9.740 Puskesmas di Indonesia. Sementara Puskesmas di Kota Medan, sudah 34 yang terakreditasi. Sementara Puskesmas yang terakreditasi di Kabupaten Nias Utara sebanyak 3 (tiga) Puskesmas yaitu Puskesmas Tuhemberua peringkat madya, Puskesmas Alasa peringkat madya dan Puskesmas Namohalu Esiwa dengan peringkat Madya. Kemudian Tahun 2019 ada 4 Puskesmas yang terakreditasi yaitu

Puskesmas Awa'ai dengan peringkat Madya, Puskesmas Sawo dengan peringkat Madya, Puskesmas Lahewa Timur dengan peringkat Dasar dan Puskesmas Lahewa dengan peringkat Utama. Sementara masih ada beberapa Puskesmas di Kabupaten Nias Utara yang masih belum terakreditasi salah satunya Puskesmas Lotu. Pihak Dinas Kesehatan telah merencanakan pengajuan akreditasi Puskesmas Lotu tahun 2020 ini. Keberadaan Puskesmas Lotu yang berada ditengah – tengah Kota Kabupaten Nias Utara namun belum terakreditasi sementara Puskesmas lainnya di Kabupaten Nias Utara sebagian besar sudah terakreditasi. Ini menjadi beban tersendiri bagi Puskesmas Lotu karena batas pengakreditasi Puskesmas tahun 2021.

Berbagai persiapan telah disiapkan Puskesmas Lotu, Mulai dari persiapan pembuatan dokumen – dokumen yang akan dinilai, pelatihan – pelatihan yang di laksanakan termasuk pelatihan. Manajemen Puskesmas Kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha. Puskesmas Lotu juga telah banyak berbenah salah satunya yaitu pembangunan gedung baru, sehingga proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara Kepala Seksi Primer yang bertugas sebagai tim pendamping akreditasi mengatakan bahwa Puskesmas Lotu tidak bisa akreditasi tahun 2019 dikarenakan gedung Puskesmas Lotu yang belum selesai. Di tahun 2020 ini gedung baru Puskesmas Lotu telah siap di bangun dan telah di tempati pada bulan Februari 2020.

Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis Kesiapan Puskesmas Lotu menghadapi akreditasi Puskesmas.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. menggunakan metode wawancara secara mendalam untuk memberikan gambaran secara menyeluruh

dan mendalam tentang kesiapan Puskesmas Lotu menghadapi Akreditasi Puskesmas. Tempat penelitian ini dilaksanakan di UPT Puskesmas Lotu. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April-Juli Tahun 2021. Informan dalam penelitian ini diambil secara Purposive. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh yang bersangkutan baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu maupun karena kegiatannya dalam proses di bidang tertentu. Informan pada penelitian ini adalah, yaitu Kepala UPT Puskesmas Lotu, Ketua Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas (dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara), Ketua Tim Akreditasi Puskesmas, KTU UPT Puskesmas Lotu.

Metode penelitian menggunakan Wawancara (*interview*), Metode Dokumentasi, Instrumen yang dipakai pada penelitian ini yaitu berupa alat perekam (*tape recorder*) dan juga alat tulis. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: Reduksi Data, *Display Data*, Verifikasi dan Simpulan.

HASIL

KOMUNIKASI

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dalam menerapkan suatu kebijakan adalah hal yang penting dan menentukan. Komunikasi yang baik dapat menghasilkan kerjasama yang baik sehingga tujuan dari komunikasi dapat terlaksana dan tersampaikan dengan baik. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan para narasumber :

“Untuk pembentukan Tim Pendamping akreditasi Puskesmas di Kabupaten Nias Utara telah dibentuk sampai untuk tahun 2020 ini, kita telah membentuk 3 (tiga) tim pendamping akreditasi di kabupaten Nias Utara dan

pembentuknya adalah Dinas Kesehatan. Dalam hal ini kami telah berkomunikasi dengan UPT Puskesmas Lotu dan melaksanakan pendampingan baik itu pemahaman standar atau dalam hal dukungan implementasi Puskesmas yang di ikuti oleh beberapa Puskesmas termasuk UPT Puskesmas Lotu dimana disitu ada pemahan standar instrumen kemudian persiapan self assesment lainnya. Kami selaku tim pendamping akreditasi akan selalu Isenantiasa menemani proses persiapan akreditasi puskesmas sehingga puskesmas Lotu benar – benat mampu melaksanakan akreditasi Puskesmas. (Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas)”

“UPT Puskesmas Lotu sudah dicanangkan untuk akreditasi sejak 2018, pada perencanaan tersebut telah dibentuk tim Akreditasi Puskesmas, dalam pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Lotu, Dinas Kesehatan sangat berkomitmen dan membantu UPT Puskesmas Lotu dalam menghadapi Akreditasi Puskesmas dan mereka juga membimbing setiap bagian – bagaian dalam akreditasi dan serta membantu membenahi seluruh kekurangan Puskesmas. Dinas Kesehatan selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Lotu Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi kepada Puskesmas kami terkait permasalahan akreditasi terutama untuk memenuhi kelengkapan dokumen akreditasi seperti Kelompok Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Upaya Kesehatan Perorangan. Dinas Kesehatan juga membantu dalam proses penggalangan komintmen dengan cara pengumpulan tanda tangan yang di hadiri oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD dan Lintas Sektoral. Hal ini membuktikan keseriusan Dinas Kesehatan dalam mendukung terlaksananya Akreditasi UPT Puskesmas Lotu. (Kepala UPT

Puskesmas Lotu, Kurniaman Harefa, SKM)”

“Saya sebagai ketua tim persiapan akreditasi UPT Puskesmas lotu mendapat perintah dari Kepala UPT Puskesmas Lotu berdasarkan SK Kepala UPT Puskesmas Lotu, kami telah melaksanakan rapat / Minilok bulanan dan linstas sektoral terkait dengan persiapan Akreditasi UPT Puskesmas Lotu. kami telah mendapatkan instruksi dari Kepala Puskesmas tentang apa-apa saja yang harus kami persiapkan untuk akreditasi ini, mulai dari pembentukan tim, pembagian tugas dan tanggung jawab serta hal – hal lain yang dianggap penting. Kami juga telah membuat penggalangan komitmen yang dihadiri langsung oleh bapak Bupati Nias utara serta beberapa kepala SKPD termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Komunikasi yang tim lakukan dengan kepala Puskesmas telah berlangsung dengan baik. Pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim akreditasi telah disusun dengan baik agar pekersiapan Akreditasi dapat berjalan dengan baik. kami telah melaksanakan rapat dalam tim akreditasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan persiapan akreditasi tiap bidang. (Ketua Tim pendamping Akreditasi Puskesmas Lotu)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, komunikasi yang baik telah terlaksana antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dengan Upt Puskesmas Lotu. Langkah – langkah persiapan menghadapi Puskesmas telah disiapkan mulai dari pembentukan Tim pendamping Akreditasi yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan pembentukan Tim Persiapan Akreditasi UPT Puskesmas Lotu yang dibentuk oleh UPT Puskesmas Lotu. Sebagai bentuk keseriusan dan

komitmen UPT Puskesmas Lotu, telah melakukan penggalangan komitmen dengan cara penanda tangan yang dilakukan oleh seluruh pegawai puskesmas yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara dan beberapa kepala SKPD termasuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara serta seluruh lintas sektoral. Sampai saat ini seluruh petunjuk dan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara maupun dari Puskesmas telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh staf UPT Puskesmas Lotu. Segala bentuk informasi tentang akreditasi Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara secara terus menerus memberikannya kepada UPT Puskesmas Lotu guna membantu dan menunjang terlaksananya akreditasi puskesmas. Apabila ada perubahan dan penambahan informasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara selalu melakukan koordinasi dengan UPT Puskesmas Lotu untuk memperbaharui dan melengkapi dokumen – dokumen persiapan akreditasi Puskesmas.

SDM, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Faskes

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia adalah salah satu hal yang terpenting dalam mewujudkan suatu implementasi. Sumber daya manusia sangat menentukan berhasilnya suatu program yang akan dicapai. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka sebuah kegiatan akan menjadi mengalami kegagalan. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber :

“Untuk SDM di UPT Puskesmas Lotu masih belum memadai karena masih

banyak kekurangan tenaga seperti untuk bagian farmasi, analisis kesehatan, dokter umum dan Dokter Spesialis, Fisioterapi dan juga administrasi yang terampil dalam menggunakan IT. Masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia di UPT Puskesmas Lotu ini telah kami laporkan kepada Dinas kesehatan Kabupaten Nias Utara dan telah diupayakan dengan memberikan tenaga Nusantara Sehat namun masih belum memenuhi kebutuhan SDM di UPT Puskesmas Lotu .”(Kepala Puskesmas Lotu, Kurniaman Harefa, SKM)”

“Sumber daya manusia yang terdapat di UPT Puskesmas Lotu ini untuk jumlahnya cukup banyak namun jika dilihat dari fungsinya dan tugasnya, maka Sumber Daya Manusia masih belum memenuhi standar karena di UPT Puskesmas Lotu menumpuk tenaga kesehatan dalam jurusan tertentu dimana hanya Perawat dan Bidan yang banyak sementara tenaga kesehatan lainnya sangat kurang sementara sangat dibutuhkan seperti tenaga farmasi, analisis kesehatan, perawat gigi dan dokter umum. Tentu hal ini sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Lotu..” (Plt. KTU UPT Puskesmas Lotu)”

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti maka UPT Puskesmas Lotu masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang memadai seperti tenaga farmasi, analisis kesehatan, kesehatan lingkungan, fisioterapi, perawat gigi dan dokter umum. Memang dari jumlah pegawai cukup banyak namun kalau dilihat dari segi fungsi dan tugasnya UPT Puskesmas Lotu masih kekurangan SDM. Hal ini telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan telah di respon dengan memberikan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat namun masih belum memadai untuk memenuhi Sumber daya manusia di UPT Puskesmas Lotu.

Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan suatu kegiatan. Walaupun sumber daya manusia telah memenuhi namun apabila sumber daya anggaran tidak memenuhi maka semua kegiatan akan terbengkalai dan tidak bisa dikerjakan. Begitu juga dalam melaksanakan penakreditasi puskesmas tentu dibutuhkan anggaran. Berikut hasil wawancara dengan informan :

“Bicara mengenai anggaran Akreditasi Puskesmas tentu ada Anggaran yang disiapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara yang di Ambil dari dana DAK (dana Alokasi Khusus) sekitar Rp 50 juta, namun untuk saat ini dana itu masih belum turun dan belum kami menerima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Biaya kami dalam melaksanakan pendamping akreditasi puskesmas kami ambil dari dana pribadi kami sendiri. Ini kami lakukan semata – mata agar proses akreditasi puskesmas dapat sukses di Kabupaten Nias Utara ini. (Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas).”

“Anggaran khusus untuk akreditasi UPT Puskesmas Lotu tidak ada karena sampai saat ini kami tidak pernah menerima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Jadi untuk melaksanakan persiapan akreditasi puskesmas maka dilakukan kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan Puskesmas. Ini biasanya rata – rata suadaya dari puskesmas dimana kita bisa ambil dari dana operasional puskesmas , namun kalau kurang dari dana tersebut terpaksa kita tanggulangi sendiri karena anggaran dari Dinas Kesehatan untuk akreditasi tidak ada sama sekali (Plt. Kepala UPT Puskesmas Lotu, Kurniawan Harefa, SKM)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan maka anggaran khusus untuk akreditasi puskesmas memang ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara

yang di ambil dari DAK (dana alokasi khusus) sebesar Rp 50 juta namun sampai saat ini uang itu belum diterima UPT Puskesmas Lotu. Dari pihak UPT Puskesmas Lotu sendiri telah menyiapkan biaya persiapan akreditasi puskesmas yang di ambil dari dana operasional puskesmas.

Sumber Daya Faskes

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam instansi merupakan sesuatu yang menjadi penunjang terselenggaranya proses mutu suatu pelayanan. Tanpa sarana dan prasarana tidak mungkin suatu pelayanan dapat terlaksana dengan baik.. Berikut merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan terkait sarana dan prasarana :

“Sampai saat ini tim pendamping akreditasi puskesmas tidak mendapatkan sarana prasaran, walaupun turun lapangan kami datang sendiri, membawa kendaraan sendiri dan menggunakan dana sendiri, tetapi tidak menjadi kendala bagi tim pendamping untuk melaksanakan pendampingan bagi puskesmas yang akan menghadapi akreditasi. (Tim Pendamping Akreditasi)”

“Mengenai sarana dan prasarana yang ada di puskesmas, saya rasa sudah lumayan baik. Ini dikarenakan gedung UPT Puskesmas Lotu merupakan gedung baru yang baru di tempati bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Kalau melihat kondisi gedung, gedung masih baru dan sudah memenuhi standar sesuai dengan peraturan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 tentang puskesmas. Namun, untuk fasilitas alat pemeriksaan di lab, kursi, ranjang pasien dan yang juga masih kurang dan pelatan pemeriksaan gigi masih belum ada. Berhubung dengan adanya akreditasi ini, kami telah menyediakan sebuah ruangan yang dapat digunakan oleh pegawai untuk rapat dan mengerjakan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk akreditas. (Plt, Kepala UPT Puskesmas Lotu, kurniawan Harefa, SKM)”

“Sarana prasana UPT Puskesmas Lotu sudah bagus apalagi gedung UPT Puskesmas Lotu merupakan gedung baru, sehingga sangat mendukung dalam proses pelayanan kepada masyarakat ditambah dengan lokasi UPT Puskesmas Lotu yang berada ditengah – tengah Kecamatan Lotu. Namun kelengkapan alat – alat instrumen kesehatan masih sangat kurang, seperti alat pemeriksaan TB dan perlengkapan lab sangat kurang, alat pemeriksaan gigi juga sudah rusak dan tidak layak pakai. (KTU UPT Puskesmas Lotu)”

“Ya mengenai Fasilitas yang kami terima dalam menunjang kinerja kami dalam melakukan persiapan akreditasi puskesmas yaitu penyediaan ruang kerja dan juga fasilitas lain seperti mesin printer, kertas, tinta dan ATK lainnya.” (Ketua Tim Persiapan Akreditasi UPT Puskesmas Lotu)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana di UPT Puskesmas Lotu sudah memenuhi standar dan ketentuan perundang – undangan. Namun masih ada beberapa kekurangan alat seperti peralatan lab dan alat pemeriksaan gigi.

Sikap

Sikap atau komitmen dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau kebijakan akan menentukan berhasilnya suatu pekerjaan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Informan terkait dengan Sikap :

“Kami sebagai pendamping Tim Akreditasi puskesmas di Kabupaten Nias Utara ini sangat mendukung pelaksanaan akreditasi puskesmas termasuk di UPT Puskesmas Lotu. Kami selalu bersedia mendampingi UPT Puskesmas Lotu dalam mempersiapkan akreditasi, baik dalam mempersiapkan Pokja admin, pokja UKM, Pokja UKP. Kami akan membantu UPT

Puskesmas Lotu dalam menyukseskan akreditasi Puskesmas. (Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas)”

“UPT Puskesmas Lotu sangat berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam kegiatan akreditasi puskesmas. Karena ini sangat penting untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akreditasi ini tentu kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kami selalu berkomitmen menyukseskan akreditasi ini walau kita sekarang dalam keadaan pandemi Covid – 19. (Plt. Kepala UPT Puskesmas Lotu, Kurniaman Harefa, SKM)”

“Tentunya UPT Puskesmas Lotu sangat mendukung terlaksananya akreditasi Puskesmas Lotu. Karena selama ini kan keadaan pelayanan di UPT Puskesmas Lotu tidak teratur, dengan adanya akreditasi semua jadi tertata dan tersusun sehingga mutu pelayanan meningkat.(Ketua tim Akreditasi Puskesmas Lotu)”

Dari pernyataan Informan diatas dapat disimpulkan bahwa UPT Puskesmas dan Pendamping akreditasi memiliki komitmen yang tinggi dan akan selalu siap dan patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dalam hal ini mengenai kebijakan pengakreditasi puskesmas. Kebijakan akreditasi puskesmas merupakan suatu kewajiban dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan kesehatan. Seluruh pegawai UPT Puskesmas Lotu memiliki sikap dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan akreditasi puskesmas walau ada sedikit kendala dalam situasi kondisi pandemi Covid – 19.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirarki

dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida. Dalam hal ini SOP (Standart Operating Procedure) digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana program maupun kebijakan. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan :

“selama ini hubungan UPT Puskesmas Lotu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara sangat harmonis dan berjalan dengan baik, keberhasilan puskesmas merupakan keberhasilan Dinas Kesehatan juga karena Puskesmas Merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.”(Plt. Kepala UPT Puskesmas Lotu)”

“Kalau masalah birokrasi ini saya kira sudah berjalan dengan baik ya karena Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara sangat mendukung seluruh Puskesmas di Kabupaten Nias Utara ini termasuk UPT Puskesmas Lotu. Di dalam UPT Puskesmas Lotu juga telah dibentuk struktur organisasi sehingga setiap pegawai mengetahui tupoksi dan tugasnya masing – masing.” (Plt, KTU UPT Puskesmas Lotu)”

Berdasarkan hasil pernyataan dengan Informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mempersiapkan akreditasi kegiatan birokrasi berjalan dengan baik. Adanya struktur birokrasi yang jelas dapat membuat pekerjaan lebih mudah dikerjakan dan tidak timpang tindih dan pegawai lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing - masing.

Proses

Proses Penyusunan Dokumen Akreditasi

Salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan akreditasi FKTP adalah bagaimana mempersiapkan

pembuatan dokumen – dokumen yang dibutuhkan di akreditasi dan mengatursistem pendokumentasian dokumen. Penyusunan atau pembuatan dokumen dalam proses persiapan akreditasi Puskesmas merupakan hal yang sangat penting dan mempengaruhi nilai akreditasi FKTP tersebut karena dokumen merupakan acuan kerja, bukti pelaksanaan dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan, serta bagian dari salah satu persyaratan Akreditasi FKTP. Berikut merupakan pernyataan dari narasumber

“Proses penyiapan dokumen sudah sudah dimulai dari tahun 2019 dan sudah cukup baik tinggal bagaimana membenahi dan menata sedikit - sedikit lagi. Namun sejak bulan Maret kegiatan penyusunan dokumen agak sedikit terganggu karena Pandemi Covid – 19 namun tetap kita siapkan demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Diseluruh Indonesiapun proses akreditasi ini akan terganggu akibat Pandemi Covid – 19 , kita berharap pandemi ini akan segera berakhir sehingga semua menjadi normal kembali” (Kepala UPT Puskesmas Lotu)”

“Tim akreditasi UPT Puskesmas Lotu sudah beberapa kali mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Gunungsitoli yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Dimana dibahas mengenai keseluruhan BAB dan juga mengenai pelatihan K3, analisa mutu pelayanan puskesmas termasuk dibahas elemen – elemen peniaian akreditasi puskesmas. Pembuatan dokumen terus kita siapakan namun karena pandemi covid – 19 ini proses pembuatan dokumen – dokumen sedikit terganggu ditambah lagi gedung UTP Puskesmas Lotu digunakan sebagai tempat dilaksanakanya Rapid test bagi anggota KPU dan Bawaslu serta seluruh panitia Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak di bulan Desember mendatang (Ketua Tim Akreditasi Puskesmas Lotu)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dapat disimpulkan bahwa UPT puskesmas masih dalam tahap pengerjaan

dan pembuatan dokumen. Seluruh dokumen hampir rampung dan selesai, tinggal memperbaiki sedikit – sedikit saja. Namun ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu Pandemi Covid – 19 dimana seluruh penyiapan dokumen agak terganggu sedikit karena berfokus dalam penanganan pandemi Covid – 19. Ditambah lagi gedung UPT Puskesmas Lotu sempat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid – 19. Kemudian UPT Puskesmas Lotu juga digunakan sebagai tempat dilaksanakannya Rapid test bagi seluruh anggota KPU dan Bawaslu serta seluruh panitia Pemilihan Kepala Daerah serentak di bulan Desember mendatang.

Pada proses pembuatan dokumen yang didasarkan pada instrumen akreditasi puskesmas yang telah ditetapkan, UPT Puskesmas Lotu masih belum memenuhi 772 elemen penilaian. Pendokumentasian pada saat ini terus disiapkan baik dari Pokja Administrasi Manajemen, Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pokja Upaya Kesehatan Perorangan.

Output

Keluaran (output) adalah kumpulan bebrapa bagia yang dihasil dari terjadinya proses dalam suatu sistem. Berdasarkan hasil penelitian di UPT Puskesmas Lotu dengan metode wawancara mendalam kepada beberapa informan, UPT Puskesmas Lotu masih dalam tahap persiapan sehingga belum dapat dikatakan siap untuk diakreditasi. Proses persiapan akreditasi ini memerlukan waktu dalam pengerjaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa UPT Puskesmas tidak siap untuk diakreditasi. Berikut pernyataan beberapa informan:

“Kesiapan UPT Puskesmas Lotu telah sampai di tahap penyiapan dokumen walaupun dokumennya baru siap sekitar 50 % lebih, ini dikarenakan pandemi Covid – 19 yang mengalihkan fokus kami dalam menyiapkan dokumen akreditasi puskesmas. Kami terus bekerja menyiapkan dokumen dan peralatan

lainnya sambil menunggu sarana – prasana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. (Plt. Kepala UPT Puskesmas Lotu)”

“Saya rasa UPT Puskesmas Lotu belum siap menghadapi akreditasi puskesmas tahun 2020 ini, dikarenakan dokumen – dokumen masih banyak yang belum siap, kemudian kelengkapan sarana prasana yang masih belum lengkap di tambah lagi pandemi Covid – 19 yang mengganggu proses persiapan dokumen. (ketua Tim Akreditasi UPT Puskesmas Lotu)”

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa persiapan masih dalam proses. sehingga UPT Puskesmas Lotu masih belum siap untuk diakreditasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kelengkapan sarana prasara yang masih belum memadai dan pandemi Covid – 19 yang terus meningkat. Namun UPT Puskesmas Lotu terus menyiapkan dokumen – dokumen akreditasi.

PEMBAHASAN

Pembahasan hasil informasi yang didapatkan peneliti dari informan dan ditambah dengan teori-teori yang ada serta penelitian terdahulu sebagai bahan masukan dalam meneliti. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap informasi-informasi tersebut, seperti berikut ini.

Masukan

Masukan dari penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kesiapan UPT Puskesmas Lotu menghadapi akreditasi puskesmas tahun 2020. beberapa hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan analisis kesiapan UPT Puskesmas Lotu dalam menghadapi akreditasi puskesmas tahun 2020. Agar proses akreditasi puskesmas dapat berjalan dengan baik setidaknya memiliki 4 variabel: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Namun setelah

peneliti melakukan wawancara secara mendalam ditemukan ada faktor lain yang bisa mempengaruhi persiapan akreditasi Puskesmas Lotu yaitu akibat pandemi Covid – 19.

Komunikasi

Hubungan Komunikasi dalam menyampaikan kebijakan dan informasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dengan UPT Puskesmas Lotu berjalan dengan baik dan lancar karena Puskesmas merupakan perpanjangan tangan Dinas Kesehatan . Begitu juga komunikasi yang dilakukan didalam UPT Puskemas Lotu berjalan lancar dan Harmonis. Baik Komunikasi Kepala UPT Puskesmas Lotu kepada seluruh pegawai puskesmas maupun komunikasi antar sesama pegawai didalam UPT Puskesmas Lotu berjalan baik dan harmonis. Apabila terdapat kendala seperti ketidak jelasan informasi dan sebagainya, maka komunikasi dua arah dapat dilakukan. Seperti yang dikatakan kepala Puskesmas Lotu bahwa komunikasi antar Puskesmas Lotu dengan Dinas Kesehatan berjalan lancar tanpa ada kendala, semua informasi dari Dinas Kesehatan akan disampaikan kepada Puskesmas Lotu, demikian juga kalau ada informasi atau hal – hal yang tidak dimengerti Puskesmas dapat berkomunikasi langsung kepada Dinas Kesehatan tanpa ada kendala yang berarti. Komunikasi yang baik telah terjalin sudah cukup lama.

Seluruh Kebijakan – kebijakan keluaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara akan selalu dipatuhi oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Nias Utara termasuk UPT Puskesmas Lotu. selama ini selalu berjalan dan di ikuti oleh setiap Puskesmas. Dinas Kesehatan selalu siap dalam mendukung puskesmas selama itu demi kemajuan puskesmas.

Dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara telah membentuk Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dimana berfungsi sebagai pendamping beberapa

puskesmas yang akan melakukan akreditasi. Tim pendamping akreditasi puskesmas telah memiliki sertifikat sebagai tim pendamping akreditasi puskesmas. Dimana tim ini telah mendapatkan pelatihan dari Kementerian Kesehatan RI. Seluruh materi dan pengalaman yang didapat tim pendamping akreditasi di pelatihan tersebut akan mereka berikan kepada puskesmas yang melaksanakan proses akreditasi dengan cara melakukan pendampingan kepada tim persiapan akreditasi di puskesmas. Komunikasi diantara kedua tim ini berlangsung dengan baik dan terjadi komunikasi dua arah diantara keduanya.

Seperti yang disampaikan oleh Plt. Kepala UPT Puskesmas Lotu mengatakan Dinas Kesehatan selalu berkoordinasi dengan Puskesmas Lotu Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi kepada Puskesmas kami terkait permasalahan akreditasi terutama untuk memenuhi kelengkapan dokumen akreditasi seperti Kelompok Administrasi Manajemen, Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Upaya Kesehatan Perorangan. Dinas Kesehatan juga membantu dalam proses penggalangan komintmen dengan cara pengumpulan tanda tangan yang di hadiri oleh Kepala Daerah, Kepala SKPD dan Lintas Sektoral. Hal ini membuktikan keseriusan Dinas Kesehatan dalam mendukung terlaksananya Akreditasi UPT Puskesmas Lotu

Kemudian komunikasi di lingkungan UPT Puskesmas sangat bagus dan lancar, dimana kepala UPT Puskesmas Lotu selalu berkomunikasi dengan seluruh staf UPT Puskesmas Lotu dalam mengkahadapi akreditasi puskesmas. Seperti yang disampaikan ketua tim persiapan akreditasi UPT Puskesmas Lotu kami sudah melakukan pertemuan minilok bulanan dan minilok lintas sektoral untuk membahas tentang persiapan akreditasi UPT Puskesmas Lotu yang dilakukan dengan cara musyawarah, penjelasan tentang persiapan akreditasi dan seluruh dokumen – dokumen yang harus

dipersiapkan. Hal tersebut menunjukkan terjadinya komunikasi yang baik antara Kepala UPT Puskesmas Lotu dengan seluruh staf di puskesmas. Seperti yang dikatakan salah seorang staf di Lotu bahwa ada komunikasi yang baik antara kepala puskesmas dengan seluruh staf dan begitu juga komunikasi antara sesama staf Puskesmas Lotu

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain. (Keith Davis, 2010). Komunikasi adalah usaha menyampaikan suatu gagasan untuk menerima umpan balik dari gagasan yang kita sampaikan". (Nurudin, 2016). "Beberapa pengertian tersebut, komunikasi adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua makhluk hidup atau lebih baik secara langsung atau melalui media elektronik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan serta pertukaran pikiran dan perasaan yang dapat dilakukan melalui isyarat, ungkapan emosi, tulisan dan lainnya, namun komunikasi yang paling efektif ialah berbicara.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penunjang lain terlaksananya program akreditasi puskesmas. Sumber daya juga merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari proses pelaksanaan akreditasi puskesmas. Apabila sumber daya tidak memadai maka kegiatan persiapan akreditasi tidak bisa berjalan dan proses akreditasi akan gagal. Sumber daya ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dari pelaksanaan akreditasi puskesmas di UPT Puskesmas Lotu. Sama seperti yang dikatakan oleh George Edward III, sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Jika pada pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah seluruh pegawai UPT Puskesmas Lotu atau individu yang diberi tugas untuk melaksanakan dan mengerjakan program persiapan akreditasi UPT Puskesmas Lotu. Kemampuan sumber daya manusia juga mempengaruhi kesiapan UPT Puskesmas Lotu menghadapi akreditasi puskesmas. Apabila kemampuan sumber daya manusia kurang dalam melaksanakan suatu program maka realisasi program tersebut tidak maksimal.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa Sumber daya manusia yang dimiliki UPT Puskesmas Lotu yang akan menjalani proses akreditasi masih tergolong minim dimana masih terdapat beberapa bagian di puskesmas yang belum diisi oleh tenaga ahli yang sesuai. Seperti pernyataan Plt Kepala UPT Puskesmas Lotu yang menyatakan bahwa adanya beberapa tenaga ahli yang masih belum dimiliki oleh UPT Puskesmas Lotu sehingga hal tersebut berdampak pada proses pelaksanaan program akreditasi puskesmas.

Peneliti menemukan beberapa persoalan diantaranya ialah kurangnya tenaga seperti bagian farmasi, analisis kesehatan, dokter umum dan Dokter Spesialis, Fisioterapi dan juga administrasi yang terampil dalam menggunakan IT. Namun seperti yang dikatakan George Edward III, jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini searah dengan yang dialami UPT Puskesmas Lotu dimana memiliki banyak pegawai namun jika dilihat dari fungsi dan tugasnya maka sumber daya manusia tidak memenuhi standar karena di UPT Puskesmas Lotu banyak tenaga kesehatan hanya menumpuk pada jurusan tertentu dimana *yang banyak* Perawat dan Bidan sementara *tenaga kesehatan lainnya sangat kurang*. Banyaknya jumlah staf tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil. Disisi lain jumlah staf yang sedikit akan mempengaruhi proses

implementasi kebijakan secara efektif. Untuk menjalankan tugas tersebut maka pihak puskesmas menggunakan tenaga ahli dari bidang lain misalnya tenaga ahli keperawatan untuk melakukan analisis kesehatan, tenaga ahli kebidanan untuk menjalankan proses farmasi di UPT Puskesmas Lotu.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka untuk UPT Puskesmas Lotu yang akan menghadapi akreditasi puskesmas masih belum memiliki sumber daya manusia yang memadai. Akan tetapi pekerjaannya yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga kesehatan dibidangnya namun terpaksa dikerjakan oleh tenaga kesehatan bidang lainnya karena keterbatasan sumber daya manusia. Seharusnya UPT Puskesmas Lotu menempatkan tenaga kesehatan sesuai dengan bidangnya supaya proses pelayanan dapat maksimal dan proses akreditasi juga dapat berhasil. Dengan kata lain kualifikasi pendidikan pegawai di Puskesmas Lotu tidak memadai.

Masalah ketersediaan Sumber Daya Manusia di UPT Puskesmas Lotu ini sebenarnya telah kami laporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan telah diupayakan dengan memberikan tenaga Nusantara Sehat namun masih belum memenuhi kebutuhan SDM di UPT Puskesmas Lotu karena tenaga kesehatan dari Nusantara Sehat tidak sesuai dengan kebutuhan yang SDM UPT Puskesmas Lotu.

Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apabila tidak ada anggaran maka suatu program atau kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dilihat dari sumber anggaran operasional untuk proses akreditasi puskesmas diambil dari DAK (dana alokasi khusus) di Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Akan tetapi anggaran tersebut belum diterima oleh UPT Puskesmas Lotu. Bahkan menurut

Kepala UPT Puskesmas Lotu Anggaran khusus untuk akreditasi UPT Puskesmas Lotu tidak ada karena sampai saat ini kami tidak pernah menerima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Jadi untuk melaksanakan persiapan akreditasi puskesmas maka dilakukan kebijakan Puskesmas. Ini biasanya rata – rata suadaya dari puskesmas dimana kita bisa ambil dari dana operasional puskesmas , namun kalau kurang dari dana tersebut terpaksa kita tanggulangi sendiri karena anggaran dari Dinas Kesehatan untuk akreditasi tidak ada. Untuk tim pendamping akreditasi bahkan diketahui bahwa mereka menggunakan dana pribadi untuk menjalankan program ini.

Bagaimana UPT Puskesmas Lotu menjalankan persiapan akreditasi kalau tidak ada anggaran. Kita ketahui bahwa anggaran merupakan faktor terpenting untuk menjalankan suatu program ataupun kegiatan. Keberadaan UPT Puskesmas Lotu merupakan sarana pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat. Dimana seharusnya Dinas Kesehatan segera mencairkan dana akreditasi puskesmas agar proses persiapan akreditasi dapat berjalan lancar.

Berdasarkan data diatas, maka diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam bidang penganggaran agar dapat segera dikeluarkan dan langsung diteruskan kepada puskesmas yang sedang melakukan akreditasi. Apabila dana tersebut telah dikeluarkan maka program ini akan berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Lotu.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sumber daya sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang sangat mendukung keberhasilan suatu kebijakan dengan efektif. Seperti yang dikatakan oleh George Edward III, sumber daya ketiga yang tidak kalah penting yaitu

fasilitas. Sebuah organisasi mungkin memiliki jumlah pegawai yang memadai, mungkin mereka ahli atau memahi apa yang tugas apa yang harus dikerjakan, namun jika tidak memiliki gedung sebagai tempat melaksanakan pekerjaan, tanpa perlengkapan atau peralatan yang memadai, tanpa pembekalan maka sudah dipastikan proses implementasi tidak akan berhasil. Secara umum, sarana dan prasarana yang ada di UPT Puskesmas Lotu dapat dikatakan baik dan telah memenuhi standar namun masih banyak peralatan – peralatan kesehatan yang kurang dan belum dimiliki oleh UPT Puskesmas Lotu, seperti yang dikatakan kepala UPT Puskesmas Lotu bahwa alat – alat pemeriksaan di lab tidak memadai, kursi, ranjang pasien juga masih kurang serta peralatan pemeriksaan gigi masih belum ada di UPT Puskesmas Lotu. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara harusnya dapat memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan sarana dan prasarana di UPT Puskesmas Lotu.

Sikap

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh informan, peneliti berkesimpulan bahwa UPT Puskesmas Lotu siap dan bertanggung jawab apa yang di instruksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara untuk melakukan akreditasi puskesmas. Hasil wawancara secara mendalam yang telah dilakukan peneliti terkait sikap antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan UPT Puskesmas Lotu telah dilakukan dengan baik dan dilaksanakan dengan patuh dan penuh tanggung jawab. Tidak ada penolakan dari seluruh staf UPT Puskesmas Lotu bahkan mereka berkomitmen untuk menyelesaikan akreditasi Puskesmas Lotu. Proses pengakreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu puskesmas mereka, dan juga dikarenakan pengakreditasi puskesmas merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh puskesmas, sehingga siap tidak siap puskesmas harus

melakukannya. Seperti pernyataan dari Kepala UPT Puskesmas UPT Puskesmas Lotu sangat berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam kegiatan akreditasi puskesmas. Karena ini sangat penting untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya akreditasi ini tentu kepercayaan masyarakat makin tinggi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas. Kami selalu berkomitmen menyelesaikan akreditasi ini walau kita sekarang dalam keadaan pandemi Covid – 19. Kesiapan dan sikap positif dari para pelaksana implementasi kebijakan serta dukungan penuh terhadap implementasi tersebut maka akreditasi akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa hubungan birokrasi yang terjalin antara Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dengan UPT Puskesmas Lotu berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Analisis hasil wawancara antara Dinas Kesehatan kabupaten Nias Utara dan UPT Puskesmas Lotu mengenai struktur birokrasi yang terjalin selama ini khususnya dalam menghadapi persiapan akreditasi Puskesmas berjalan dengan baik dan sangat harmonis dimana semua informan mengatakan tidak memiliki kendala dan masalah mengenai tersebut. Segala keluhan dapat disampaikan kepihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara seperti halnya permasalahan kekurangan tenaga farmasi, dokter umum, fisioterapi, dan peralatan laboratorium di respon dengan baik serta mendapatkan respon yang positif.

Pengaruh Pandemi Covid – 19

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan

pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, baik dari segi kesehatan maupun sektor ekonomi mengalami dampak serius akibat pandemi virus Covid - 19. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Banyak juga pekerja yang di berhentikan kerja karena perusahaan mengalami krisis ekonomi.

Pandemi Covid – 19 juga berpengaruh terhadap proses persiapan akreditasi di Puskesmas Lotu. Pandemi Covid – 19 ini mengganggu proses persiapan akreditasi puskesmas. Pembatasan jarak dan pembatasan pertemuan yang mengakibatkan segala aktivitas penyiapan dokumen akreditasi terganggu seperti yang dikatakan ketua Tim persiapan akreditasi Puskesmas Lotu fokus kami agak lari dari penyiapan dokumen akreditasi puskesmas karena Covid – 19. kalau tidak ada covid - 19 ini mungkin sudah siap semua dokumen ini. diseluruh indonesia mengenai akreditasi ini terganggu. Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pandemi covid – 19 sangat berpengaruh dalam proses persiapan akreditasi Puskesmas.

KESIMPULAN

UPT Puskesmas Lotu belum siap untuk menghadapi Akreditasi Puskesmas tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid – 19 yang mengganggu proses pembuatan dokumen akreditasi dan masih belum lengkapnya sarana prasana yang adadi Puskesmas Lotu ditambah lagi kurangnya tenaga kesehatan Puskesmas Lotu di

jurusan tertentu, sehingga UPT Puskesmas Lotu masih belum siap menghadapi akreditasi puskesmas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Puskesmas Lotu yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar, (2015). *Pedoman Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*.
- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dasar, (2015). *Pedoman Survei Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46, (2015) *tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43, (2016) *Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 (2013). *tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Kementerian Kesehatan RI (2013). *Instrumen Akreditasi Puskesmas*. Jakarta
- Muhammad Wicaksono, (2016). *Kesiapan Dinas Kesehatan Kota Binjai dalam implementasi akreditasi puskesmas (Skripsi) Universitas Sumatera Utara*.
- UPT Puskesmas Lotu, (2020). *Profil Upt Puskesmas Lotu Kabupaten Nias Utara*.
- Idris, Irwan, (2015). *Analisis Kesiapan Puskesmas Dalam Implementasi Akreditasi di Kota Lhoksumawe. Tesis, Universitas Sumatera Utara*.

Universitas Sarimutiara Indonesia. (2019)
Pedoman penulisan Tesis.
Buku Panduan / User Manual Penggunaan
Aplikasi Rencana Kebutuhan SDM
Kesehatan. (2016) *Metode Analisis
Beban Kerja Kesehatan.*
Myrnawati, (2018). *Metodologi Penelitian
Untuk Pemula, Jakarta;
Pustakapedia.*

Sugiono, (2017). *Metode Penelitian
Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,
Jakarta; Alfabeta*
Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias,
(2019). *Kabupaten Nias Utara
Dalam Angka.*